

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan Islam sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya memiliki tanggung jawab berat dalam mewujudkan cita-cita luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berkompetisi dalam persaingan dunia global.¹ Dengan demikian, satu kata kunci untuk mencapai itu semua adalah peningkatan mutu pendidikan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pembiayaan atau pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem sekolah.

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang mencerminkan upaya pemerintah ini adalah dengan menerapkan kebijakan paling mendasar terkait penanggungjawab penyelenggara pendidikan yang semula bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Perubahan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang membawa konsekuensi kewenangan daerah sehingga lebih otonom, termasuk bidang pendidikan.²

Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut tentu akan berimplikasi pada kebijakan pemerintah daerah dan juga lembaga pendidikan bersangkutan dalam menentukan arah kebijakan, termasuk pada perumusan program-program pendidikan dan pembelajaran serta nilai-nilai yang akan ditanamkan pada peserta didiknya. Program-program suatu lembaga pendidikan tidak

¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 2

² *Ibid.*, hlm. 4

dapat dilepaskan dari upaya-upaya pemerintah daerah dan lembaga pendidikan bersangkutan dalam mendesain dan mengarahkan tujuan pendidikannya pada tataran intelektual dan tataran nilai yang akan diinginkan, sebab setiap daerah dan setiap lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda baik tingkat perumusan program maupun pada tingkat pelaksanaannya, walaupun secara administratif harus tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat. Jadi, konsep ideal kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendidikan adalah memberi ruang yang lebih luas kepada sekolah untuk menyelenggarakan programnya, sehingga layanan belajar menjadi semakin menarik dan kompetitif.³ Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik adalah masalah keuangan.

Proses pendidikan dan pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang dalam penyusunannya tidak dapat lepas dari faktor pembiayaan. Hal ini karena di dalam pelaksanaannya, ada banyak hal yang harus dilakukan, disiapkan, dan selanjutnya diadakan agar proses berlangsung lancar. Berbagai hal harus disiapkan dan disediakan oleh pengelola pendidikan, khususnya sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran. Dengan dana ini, semua sarana dan prasarana serta operasional pendidikan dapat disediakan oleh sekolah.⁴ Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran akan berimplikasi pada semangat siswa untuk belajar dan memudahkan guru dalam mengajar.

Dalam hal keuangan Allah SWT menerangkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَابْتَغُوا الْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ...

³ Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 68

⁴ Mohammad Saroni, *Orang Miskin Harus Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 11

“Anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisa’: 6)⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa merefleksikan pesan halus bahwa merupakan suatu kewajiban agama dan kebutuhan dasar setiap individu muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip manajemen keuangan. Hal itu karena harta dalam Islam merupakan amanat dan hak milik seseorang serta kewenangan untuk menggunakannya terkait erat dengan adanya kemampuan (kompetensi) dan kepatutan (integritas) dalam mengelola aset atau dalam istilah prinsip kehati-hatian.

Penerapan peraturan dan system manajemen keuangan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.⁶

Sedangkan soal yang menyangkut keuangan di sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau sekarang menjadi sumbangan operasional pendidikan (SOP), uang kesejahteraan personel dan gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan peningkatan mutu pendidikan.⁷

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lain. Adanya keberagaman ini sangat

⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Pelita, Jakarta, 1980, hlm. 197

⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 256

⁷ Sulistiorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Elkaf, Surabaya, 2006, hlm. 97

dipengaruhi oleh status sekolah bersangkutan, letak/lokasi sekolah serta jumlah siswa di sekolah itu sendiri. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya masih sederhana. Sedangkan pada sekolah-sekolah yang daya dukung masyarakatnya tinggi, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dan beragam sesuai tuntutan masyarakat.

Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi paling berharga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan suatu bangsa. Seringkali kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauh mana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan suatu bangsa maka semakin majulah bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauh mana *output* suatu lembaga pendidikan dapat membangun manusia yang paripurna sebagaimana tahapan pendidikan.⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga survey pendidikan menunjukkan kemerosotan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2011 *World Bank* menyimpulkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Survey yang melibatkan 50 negara di dunia menempatkan pendidikan Indonesia lebih rendah dibawah Brasil dan Meksiko. Survei dilakukan terhadap sistem pendidikan di 50 negara, dengan memadukan hasil tes internasional dan data-data, seperti tingkat kelulusan antara 2006 dan 2010 yang diambil berdasarkan tes setiap tiga atau empat tahun di berbagai bidang, termasuk matematika, sains, dan kesusastraan.⁹

Sementara berdasarkan data dalam *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan UNESCO dan diluncurkan di New York pada Senin, 1 Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia

⁸ Deni Kuswara dan Cepti Triatna, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 287

⁹<http://lpsa.or.id/lembaga-survey-pendidikan-utama-pearson-mutu-pendidikan-indonesia-masih-rendah/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2015

berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Lembaga yang selalu memonitor perkembangan pendidikan di berbagai negara di dunia setiap tahun itu menempatkan kualitas pendidikan Indonesia masih lebih baik dari pada Filipina, Kamboja, dan Laos. Tetapi apa artinya dengan membandingkannya dengan tiga negara yang memang selama ini peringkatnya tidak pernah berada di atas Indonesia. Survei ini menggunakan empat tolok ukur, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada anak usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Di Jawa Timur saja beberapa waktu lalu pemerintah provinsi Jawa Timur mengumumkan dari 37 juta penduduk Jawa Timur masih terdapat kurang lebih 6 juta penduduk yang masih buta huruf. Begitu juga dengan tolok ukur mengenai kesetaraan jender dalam praktik pendidikan masih jauh dari angka ideal. Kendati isu kesetaraan jender terus dikumandangkan dan pemerintah secara khusus mengangkat menteri untuk menangani masalah perempuan, pembangunan kesetaraan jender masih menemui banyak kendala di Indonesia. Malah ada yang menganggap kesetaraan jender adalah agenda masyarakat Barat dan bertentangan dengan nilai budaya bangsa, lebih-lebih nilai agama (Islam).¹⁰

Di Tingkat Asia saja saat ini Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunai Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu Asia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian medium seperti halnya Indonesia. Meskipun demikian, posisi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109).¹¹

Dari paparan di atas, tampak jelas bahwa manajemen keuangan merupakan satu hal penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, peneliti ingin menggali informasi dan temuan hasil penelitian yang

¹⁰ Rahmat Faisal Harahap, *Peringkat RI dalam Mutu Pendidikan*, diakses pada tanggal 28 Desember 2015

¹¹ Muhammaad Azhar, *Kualitas Pendidikan Indonesia*, diakses pada tanggal 28 Desember 2015

berkenaan dengan manajemen keuangan atau pendanaan yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak.

Manajemen keuangan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak merupakan MTs yang berdiri sejak 1985, akan tetapi peningkatan kualitas secara fisik tidak begitu signifikan. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan fisik madrasah yang belum begitu memadai. Sedangkan soal yang menyangkut keuangan di madrasah yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau sumbangan operasional pendidikan (SOP), uang kesejahteraan personel dan gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan peningkatan mutu pendidikan belum dikelola secara maksimal. Hal ini sendiri diungkapkan oleh salah satu staf keuangan di MTs ini yang mengakui bahwa adanya manajemen keuangan yang belum dikelola secara maksimal. Berikut petikan wawancaranya:

“Staf keuangan: memang benar di MTs ini dalam manajemennya belum bisa mengelola secara maksimal. Itu bukan berarti SDM nya yang tidak bisa mengelola akan tetapi memang berbagai masalah timbul terutama dalam hal keuangan. Walaupun madrasah ini dari segi prestasi masih lebih unggul dibanding dengan MTs-MTs yang ada di kecamatan. Bahkan di tingkat kabupaten dan propinsi madrasah ini masih bisa menunjukkan prestasinya di bidang akademik maupun di bidang seni. Akan tetapi masalah keuangan selalu timbul. Dari operasional madrasah yang kadang tersendat karena bantuan oprasional madrasah yang sering kali terlambat. Sehingga bisyaroh pendidik pun juga terlambat. Karena di madrasah ini merupakan madrasah salafiyah yang ada muatan local yang menjadi ciri khas madrasah ini. Jadi, pendidiknya yang mengajar pelajaran salaf masih membutuhkan bisyaroh yang kadang terlambat. SPP pun yang dibayarkan setiap bulan dari peserta didik belum bisa menutupi masalah keuangan yang ada di Madrasah ini, karena penyelenggaraan sekolah pun membutuhkan pembiayaan juga yang diambil dari keuangan madrasah.”¹²

Dari petikan wawancara tersebut terdapat permasalahan keuangan yang masih sama dari masa ke masa. Misalnya, penggajian guru yang kadang tersendat terutama guru yang mengajar muatan local atau pelajaran salaf.

¹² Khomsin, Wawancara Staf Keuangan MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak, 3 Desember 2015

Keuangan sekolah yang terkait dengan penyelenggaraan madrasah setiap harinya dan perbaikan sarana prasarana demi terselenggaranya pendidikan yang memenuhi standar yang masih sama saja.

Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU menjadi daya tarik sekaligus menjadi keunikannya adalah: (1) MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU merupakan madrasah tingkat menengah yang dikelola bukan negeri yang cukup maju di wilayah Kecamatan Karanganyar dan berada di tengah Desa, di bawah naungan LP Ma'arif NU (2) MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU merupakan salah satu dari dua MTs bukan negeri di Karanganyar yang mendapat bantuan proyek dari Australia, (3) memiliki jumlah siswa tidak terlalu banyak di wilayah Kecamatan Karanganyar, (4) sarana dan prasarana yang dimiliki cukup lengkap dan tapi belum memadai, (5) salah satu madrasah yang konsisten dengan mata pelajaran salaf dengan menggunakan kitab kuning, (6) MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU salah satu MTs yang berprestasi dan selalu aktif dalam berbagai kompetisi daerah baik di bidang akademik dan non akademik, (7) Secara geografis letak MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU berada di tengah desa namun prestasi yang di dapatkan MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU baik di tingkat daerah kabupaten dan provinsi tidak kalah dengan madrasah-madrasah yang secara geografis letaknya lebih menguntungkan.

Berbicara tentang mutu pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah/madrasah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah/madrasah) tidak berjalan. Biaya (*cost* dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis penyelenggaraan yang berkenaan dengan

semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang dan tenaga yang dapat diuangkan). Dalam pengertian ini misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi semua sarana fisik, baik sekolah maupun guru juga adalah biaya.¹³

Mulyasa menegaskan, bahwa biaya merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini akan lebih terasa dalam implementasi otonomi sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sumber dana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan.¹⁴

Masalah mendasar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah adalah mutu pendidikan dan keuangan yang berhubungan dengan pendanaan, baik madrasah yang dikelola oleh pemerintah (madrasah negeri) maupun madrasah yang dikelola oleh masyarakat (madrasah swasta), sehingga masih memprihatinkan jika dilihat dari mutu pendidikannya. Beberapa problem yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah selama ini adalah:

Pertama, lemahnya segi manajemen. Dalam hal ini pengelolaan madrasah belum benar-benar diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan profesional, baik dari perencanaan, programming, proses pembelajaran sampai pada evaluasinya. Masih banyak madrasah yang dikelola atas dasar 'asal jalan' (terutama madrasah-madrasah swasta yang hidup segan mati tak mau (*wujuduhu ka'adamihi*)).

Kedua, SDM yang kurang memadai dan kurang 'mumpuni' (profesional). Tidak dipungkiri bahwa masih banyak para pengelola dan tenaga pendidik di madrasah yang masih belum memenuhi standar profesionalisme untuk sebuah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Etos kerja yang didasari pada

¹³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 4

¹⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 167

semboyan "ihlas beramal" malah menjadi alat legitimasi untuk berbuat 'asal jalan' dan 'semaunya'. Padahal penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak bisa demikian. Belum lagi tenaga pendidik yang dimiliki madrasah masih banyak ditemui terjadi *miss-match* (ketidaksesuaian) antara disiplin keilmuan yang dimiliki dan tanggung jawab keilmuan yang diampunya (misalnya lulusan madrasah aliyah atau lembaga pendidikan agama mengampu pelajaran umum).

Ketiga, Input siswa yang pada umumnya bukan anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan 'bagus' karena masuk ke madrasah bukan menjadi pilihan pertama. Pendidikan madrasah masih menjadi kelas dua setelah pendidikan sekolah, sehingga umumnya orang tua baru mau memasukkan ke madrasah apabila anaknya tidak diterima di sekolah umum (terutama di sekolah yang bermutu/unggulan).

Keempat, dana yang minim. Pengelola madrasah merasa kerepotan untuk mengadakan penyelenggaraan yang bermutu, sementara tuntutan pendidikan bermutu harus didukung oleh dana yang besar.

Berawal dari fakta dan paparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada manajemen keuangan dengan judul **"Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak."**

B. Fokus Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui dengan jelas masalah utama dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan manajemen keuangan.

Namun focus penelitian dalam manajemen keuangan ini adalah manajemen keuangan dalam madrasah yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana dalam menunjang proses pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga standar pendidikan secara bertahap dapat terpenuhi dan mencapai mutu pendidikan yang diinginkan.

Adapun manajemen keuangan di dalam penelitian ini, adalah kegiatan keuangan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban di dalam manajemen keuangan yang ada di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak.

Sedangkan mutu yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah mutu *input* (masukan), yang mana mutu *input* merupakan suatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses sehingga hasil (*output*) yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan madrasah.

Kepala madrasah merupakan sumber daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinir dan menyelaraskan sumber daya lainnya sehingga tujuan di dalam tujuan lembaga pendidikan yang dipimpinnya akan terwujud. Sebagai top manajer yang hebat tugas kepala sekolah adalah mampu mengendalikan manajemen keuangan yang ada di dalam lembaga yang dipimpinnya.

Secara formal, tugas kepala madrasah adalah melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin yang erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim dan budaya sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif, efisien, dan produktif.

Pendidikan merupakan kegiatan yang dinamis bukan statis, karena tantangan akan perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Pendidikan menjadi focus perhatian dan sekaligus sebagai sasaran ketika pendidikan tidak bisa memenuhi keinginan bersama. Hal ini terjadi karena pendidikan menyangkut hajat dari semua orang sehingga memerlukan perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dirancang untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu.

Bertolak dari MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak yang merupakan salah satu madrasah bukan negeri yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya dan salah satu permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk dipecahkan adalah mengenai manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana di

dalam lembaga pendidikan ini. Maka dipandang perlu untuk mengungkap akar permasalahannya untuk memecahkan dan mencari solusi dari permasalahan keuangan. Ketika permasalahan bisa terpecahkan kemudian terjadi perbaikan maka mutu di dalam madrasah ini dapat ditingkatkan.

Agar penelitian tidak terlalu meluas, maka yang menjadi focus penelitian adalah “bagaimana manajemen keuangan yang berkaitan dengan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak?”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada Manajemen Keuangan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak ?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak ?
3. Bagaimana evaluasi keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak ?
4. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis perencanaan keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak.
3. Untuk menganalisis evaluasi keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak
4. Untuk menganalisis pertanggungjawaban keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama yang berperan dalam dunia pendidikan. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu pendidikan terutama mengenai konsep implementasi manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam tingkat menengah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pihak MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam praktik manajemen keuangan di Madrasah Tsanawiyah.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Pada garis besarnya tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: muka, isi, dan akhir. Pada bagian muka tesis tercantum: halaman judul tesis, lembar pengesahan, motto, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian isi terdiri dari lima bab, sedangkan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas: Latar belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas: Teori Manajemen Keuangan, Teori Mutu Pendidikan, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas: *pertama*, Paparan data meliputi gambaran umum objek penelitian yang meliputi: Tinjauan historis dan profil MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak, Letak Geografis, Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah, Keadaan Guru dan Karyawan, Struktur Organisasi, Keadaan Siswa dan Sarana Prasarana. *Kedua*, Deskripsi Data Penelitian (Manajemen Keuangan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban). *Ketiga*, Analisis Manajemen Keuangan dalam Peningkatkan Mutu di MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas: Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup. Kemudian bagian akhir penulis lampirkan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

